

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Relasi di antara negara dan MNC dalam mekanisme ekonomi politik global menjadi salah satu fitur ekonomi yang tidak dapat dipisahkan (Ostry, 1997:5). Konsepsi antara kepentingan ekonomi domestik negara dan perusahaan tak jarang menemui episode yang kontradiktif. Para ekonom klasik (*Neo-classical economist*) menganggap bahwa perilaku perusahaan ditentukan oleh pasar, sehingga kewarganegaraan sebuah firma yang beroperasi dalam negeri maupun internasional dianggap tidak penting (ICI, 1994:9-10). Hal tersebut dapat dibenarkan, sebab belum adanya model yang cukup strategis dalam mengkaji sikap oligopolistik maupun monopolistik yang diperankan oleh MNC di dalam pasar tidak sempurna serta batas-batas negara (domestik) dan global. MNC diilustrasikan sebagai pertukaran antara faktor produksi terhadap arus barang internasional melalui investasi asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI), dengan asumsi bahwa perdagangan dan investasi adalah pertukaran yang sempurna. Yang perlu ditelusuri lebih dalam, yaitu bagaimana aktivitas MNC di dalam sebuah payung kedaulatan suatu negara dalam menjalankan aktivitas perdagangannya secara kontinyu.

Dalam konteks Indonesia dan PTFI, perilaku strategis perusahaan dalam mengeksport produk tembaga ke pasar global sangat dipengaruhi oleh lokasi kegiatan produksi yang dapat mempengaruhi tingkat permintaan tembaga di pasar global. Selain itu, perilaku strategis sangat mempertimbangkan faktor historis baik dalam bentuk penanaman modal maupun stabilitas rezim politik domestiknya

(*path dependence in the economy activities*). Pengaruh sebuah perusahaan setingkat PTFI sebagai akibat dari rezim perdagangan global (*free market capitalism*) terkadang luput dari perhatian, sehingga determinasi sebuah negara terkesan ceroboh dalam melihat risiko *appropriability* (peluang dan distribusi profit) dari MNC (Gilpin, 2001:281) terutama dalam pertimbangan jangka panjang. Baik terkait aset dagang dan teknologi serta otoritasnya dalam mekanisme hulu-hilir faktor produksi suatu industri. Dalam menelaah motif perilaku di antara negara dan MNC dibutuhkan beberapa tinjauan dari beberapa perspektif serta literatur dalam ekonomi politik global dan politik bisnis internasional. Hal tersebut ditujukan agar posibilitas penggunaan pendekatan dalam mencapai penyelesaian masalah untuk menjaga stabilitas pasar dapat mengerucut hingga menjustifikasi perubahan sikap negara dalam memandang aktivitas MNC. Penulis akan menjabarkan relevansi variabel-variabel dalam penelitian berikut sehingga dapat digunakan pendekatan Keseimbangan Nash dalam *Game Theory* (Stengel, 2001). Baik variabel terikat dan bebas, secara deduktif dijewantahkan menggunakan teori-teori yang relevan dengan studi Hubungan Internasional di dalam kajian Ekonomi Politik Internasional dan Politik Bisnis Internasional.

2.1. Literature Review

2.1.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Indikator di antara korelasi variabel yang paling fundamental di dalam penelitian ini merujuk pada relasi di antara negara dan MNC dalam implikasinya terhadap studi Hubungan Internasional. Komposisi variabel, konsep dan teori-

teori yang digunakan sedapat-dapatnya dikonseptualkan dengan tinjauan penelitian sebelumnya yang kemudian akan diasosiasikan dengan rumusan masalah di dalam penelitian ini. Sehingga beberapa referensi penelitian terdahulu diperlukan sebagai acuan dalam menyusun desain sintesis dari analisis yang ada, sekaligus mengkomparasikan skema metodologis hingga teoretisnya dalam mempengaruhi hasil penelitian.

Salah satu telaah yang dekat dengan indikator penelitian ini adalah tulisan Evren Koskal. Dalam tesisnya yang berjudul *The Impact of Multinational Corporations on International Relations: A Study of American Multinationals*, Koskal menitikberatkan analisis terhadap peran MNC dalam aktivitas ekonomi dan agenda internasional serta pengaruhnya terhadap negara bangsa dan urusan internasionalnya (Koskal, 2006:11). Koskal menempatkan wilayah analisisnya ke dalam dua pendekatan dan level analisis; yaitu negara dan MNC. Melalui pendekatan biner tersebut, Koskal mempertanyakan relevansi di antara *structural power* serta bagaimana negara merespons (atau mendifusikan) kemunculan kekuatan aktor non-negara di wilayah politik dan ekonomi internasionalnya. Perdebatan yang muncul di dalam penelitiannya, yakni bagaimana proses transisi hegemonik negara tidak terbatas pada negara saja melainkan sub sistem yang memiliki kekuatan terbatas (*limited power*). Sub sistem yang dimaksud Koskal berkaitan dengan bagaimana peran MNC di dalam sistem internasional tidak hanya berada pada level mikro, namun memiliki potensi yang manipulatif dalam mempengaruhi entitas negara di sistem makro. Transisi paradigmatik tersebut disebutkan Gilpin sebagai upaya negara dalam mengasosiasikan kepentingan nasionalnya dengan kekuatan dari MNCs (Gilpin 1993:3).

Sementara itu, Koskal membatasi analisis studi kasusnya pada hubungan variabel bebas dan terikatnya yaitu MNCs (Boeing vs Airbus, Lockheed-Martin, Exxon-Mobil & Enron) dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Melalui pendekatan kualitatif dan metode historis analisis, Koskal mengukur sampai mana keterkaitan di antara kepentingan korporasi dan kepentingan negara dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Melalui teori dan konsep interdependensi, *triangular diplomacy* dan perkembangan MNCs di dalam batas-batas negara (*home-host country*) Koskal berargumen bahwa; 1) tatanan global dalam agenda perdagangan internasional telah memfasilitasi hubungan dagang baru (*new-interdependence*) di antara negara dan MNCs; 2) dalam menginternalisasi kepentingan korporasinya, MNCs menggunakan FDI (*Foreign Direct Investment*), *Joint Ventures*, dan *Portofolio Investment* untuk mengkooperasikan dan mengintervensi kepentingan politik dan ekonominya ke dalam kedaulatan negara; 3) globalisasi menggiring MNCs untuk menempatkan negara ke dalam set denasionalisasi melalui arus kapital sehingga otoritas negara dapat direduksi; 4) melalui kemampuan intervensi di level sistem yang eksogenus, MNCs dan negara berada pada proses diplomasi posisi tawar yang diakibatkan oleh interdependensi. Hasil penelitian Koskal menunjukkan bahwa peranan MNCs dalam ruang lingkup ekonomi dan politik Amerika Serikat tidak lagi dalam wilayah domestik melainkan dapat mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi luar negerinya. Amerika Serikat sendiri sebagai negara dengan *structural power* terbesar di dunia pun harus dengan senang hati membagikan haknya kepada MNCs dan sekaligus memposisikan MNCs sebagai aktor yang memiliki pengaruh ‘dominan’ dalam ekonomi dan politik global.

Persamaan penelitian Koskal dengan penelitian ini berada pada unit analisisnya yang mengidentifikasi negara dan MNC sebagai aktor tunggal yang rasional. Walaupun ruang lingkup analisisnya berada pada wilayah sistem makroskopis yang sama dengan penelitian ini, namun Koskal tidak mengidentifikasi secara spesifik pandangan paradigmatiknya dalam merespons interdependensi yang terjadi sehingga mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sedangkan perbedaan yang mendasar, yakni konteks variabel di dalam penelitian ini berada pada struktur multivariat dengan menempatkan interpretasi analisis yang *state centric*. Baik dari variabel bebas dan terikatnya, sangat jelas analisis sebab akibatnya tidak mengkhususkan MNC sebagai ‘akibat’ melainkan variabel prakondisi yang menyebabkan negara merespons aktivitasnya.

Penelitian selanjutnya yang dekat dengan konsep analisis dalam penelitian ini adalah Yonathan Susilo (2012) yang berjudul *Dominasi Peran Negara dalam Era Kapitalisme Global: Aplikasi Game Theory dalam Studi Kasus Perdagangan China-Amerika Serikat (1994-2010)*. Metode penelitian yang digunakan Susilo adalah metode kuantitatif dengan indikator yang telah ditetapkan sebelum pengumpulan data. Namun, penelitian yang ditempuh tidak melalui kuantifikasi yang bersifat numerik, metode statistika dan matematika melainkan sifat hubungan variabel akan dideskripsikan secara akurat. Melalui pengaplikasian konsep *game theory* dan Keseimbangan Nash, Susilo mengukur kemungkinan terjadinya dominasi negara dalam praktik kapitalisme global. Unit analisis yang ditinjau di dalam penelitiannya tersebut adalah negara: China dan Amerika Serikat. Sedangkan studi kasus yang menggambarkan fenomena empiris tentang bagaimana peran negara yang meningkat dalam aktivitas ekonomi global adalah

perdagangan China-AS. Sedangkan untuk melakukan pengumpulan data, Susilo menggunakan metode studi literatur dalam mengkaji data primer berdasarkan dokumen-dokumen.

Landasan utama dalam penelitian Susilo, didasarkan pada pendekatan *state-centric* melalui perspektif realisme klasik. Alat ukur dalam meninjau relasi antar variabel adalah keseimbangan Nash. Konsep keseimbangan Nash digunakan untuk mengoperasionalkan kemungkinan permainan yang diakumulasikan di dalam *strategic form* pada studi kasus China-AS (1994-2010) dengan mengukur perilaku kebijakan negara dan nilai tukar. Adapun beberapa asumsi penelitian yang dikontekstualisasikan melalui aktor, studi kasus dan periodisasi, yaitu sebagai berikut: 1) intervensi negara di China terjadi akibat inisiatif pemerintah China dalam melihat pasar sebagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk melayani kepentingan nasionalnya, namun bukan kepentingan nasional setiap individual melainkan kepentingan partai penguasa (Partai Komunis China). Akibatnya dalam pola interaksi di antara kedaulatan dan pasar, intervensi negara bukan hanya ada ketika terjadi resesi melainkan sebagai sebuah pilihan strategis ekonomi politik jangka panjang. 2) Sedangkan, kapitalisme di AS dengan bentuk dominasi dan intervensi negara ke dalam aktivitas ekonomi di antara negara dan pasar hanya terjadi ketika negara mengalami resesi dan kondisi anarki dalam publik AS untuk menuntut pemerintah.

Berdasarkan empat pemilahan periodisasi, matriks yang terbentuk dari penggunaan konsep Susilo berkisar 4 kolom dengan periode I (1994-2001), periode II (2001-2005), periode III (2005-2008) dan periode IV (2008-2010). Kecenderungan pertama adalah jika China memilih untuk menggunakan strategi

(I) mematok nilai mata uangnya terhadap USD, sedangkan AS tetap menggunakan strategi (II) perdagangan bebas, maka kerugian relatif besar oleh AS dan akibatnya yang disebabkan oleh tekanan domestik. Alhasil, AS harus mengambil kebijakan substitutif berupa kebijakan protektif terhadap perdagangannya dengan China dan mendorong China untuk meliberalkan kebijakan nilai tukarnya. Pada hasil analisis keseimbangan Nash pada periode I-II, Susilo mendapati bahwa AS mengalami kerugian relatif. Kedua, kecenderungan dominasi peran negara berada pada hasil yang positif. Ketiga, keuntungan atas akses pasar internasional harus dikompensasi oleh China dengan memberikan akses pasar domestiknya terhadap AS. Keempat, adanya kesenjangan di antara nilai tukar RMB yang dipatok tetap masih berdasarkan batas-batas mekanisme pasar yang dapat ditoleransi oleh AS. Hasil kecenderungan lainnya, mengisyaratkan bahwa manifestasi kedaulatan dan interaksinya terhadap pasar serta dominasi kapitalistik negara diupayakan dalam ruang lingkup kebijakan perdagangan dan nilai kurs pada kaca mata ekonomi politiknya.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Susilo, yakni berada pada unit analisisnya serta variabel yang dijadikan tinjauan analisisnya. Selain itu, walaupun secara konseptual memiliki kemiripan yakni menggunakan teori permainan dan keseimbangan Nash untuk mengukur kemungkinan strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat, namun pendekatan analisisnya berada pada indikator yang berbeda sehingga format analisisnya berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengkondisi dan indikator yang ditelaah sehingga skenario permainannya pun berbeda. Susilo menggunakan pendekatan kuantitatif yang disesuaikan dengan 4

ruang lingkup periodisasi, sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan periode waktu yang berkelanjutan.

Penelitian terakhir yang menjadi rujukan dalam penulisan penelitian ini adalah Thom van Gerwe (2016) yang berjudul “*Root Cause Analysis of Price Behaviour of Copper and Copper Market Volatility*”. Gerwe dalam penelitiannya menitikberatkan analisis pada peristiwa dan perkembangan internasional serta hubungan kausalitas terhadap pasar tembaga. Gerwe menggunakan perangkat data historis dalam mempengaruhi pasar tembaga untuk mendapatkan validasi terkini tentang hubungan sebab akibatnya. Indikator-indikator yang menjadi penunjang analisis Grewe berada pada data historis yang dipengaruhi situasi politik dan ekonomi internasional yaitu sebagai berikut; *supply & demand*, pasar, ledakan ekonomi, teknologi, aksesibilitas dan perang (Gerwe, 2016:157).

Berdasarkan relevansi di antara indikator dan pendekatan studi kasus yang digunakan Gerwe, berikut adalah hasil temuan dari tesis Gerwe: 1) Adanya relevansi di antara pembangunan berkelanjutan dengan permintaan tembaga; 2) persediaan tembaga memiliki keterkaitan dengan harga tembaga dengan mengacu pada inventaris pasokan naik/turun yang disesuaikan dengan prinsip komersial; 3) ketidakpastian di pasar finansial tidak selalu mempengaruhi pasar tembaga. Namun, apabila ketidakpastian disebabkan oleh resesi maka akan menyebabkan penurunan permintaan dan harga tembaga; 4) ketika Indeks Dolar AS (USDIX) tinggi, tembaga menjadi lebih mahal dalam mata uang non-dolar yang mengakibatkan melemahnya permintaan. Sebaliknya, dibutuhkan lebih banyak dolar untuk membeli tembaga ketika USDIX rendah dan meningkatkan harga. USDIX itu sendiri dan peristiwa/perkembangan yang mempengaruhi USDIX

dianggap sangat penting bagi pasar tembaga (Gerwe, 2016:159); 5) ledakan ekonomi dalam suatu negara di wilayah regional memiliki pengaruh terhadap penggunaan tembaga per kapita yang signifikan; 6) tren nasionalisasi tembaga dipengaruhi oleh harga yang tinggi dan ketimpangan ekonomi domestik yang rendah.

2.2. Kerangka Teoritis

2.2.1. Interpretasi Pendekatan *State Centric*

Interpretasi pendekatan *state centric* memiliki dua asumsi yang esensial: 1) dampak proteksionisme terhadap agregasi kemakmuran rakyat; 2) pemerintah dapat mengoperasionalkan tekanan kelompok kepentingan secara independen (Oatley, 2011:90). Asumsi pendekatan *state centric* meyakini bahwa kebijakan perdagangan yang proteksionis dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui dua set esensial tersebut, pemerintah dapat secara leluasa mengintervensi aktivitas ekonomi domestik melalui tariff, subsidi produksi dan instrumen kebijakan lainnya yang dapat meningkatkan agregasi kesejahteraan rakyat. Intervensi pemerintah tersebut dipengaruhi oleh situasi industri yang tidak menguntungkan dan pemerintah secara komparatif melakukan transisi ke dalam industri pada sektor yang lebih menguntungkan (Oatley, 2011:91). Oatley menjustifikasi peletakkan tarrif dalam industri yang pengembaliannya rendah (*low returns*) akan dapat mengubah situasi keuntungan yang lebih tinggi (*higher returns*). Selain itu, penyederhanaan asumsi interpretasi *state centric* dapat berupa promosi *infant industry* melalui BUMN atau bagaimana negara memberikan perlakuan khusus terhadap perusahaan domestiknya dengan memproteksi persaingan yang dapat

berbentuk monopoli dan duopoli. Perangkat paradigma yang relevan dengan penamaan interpretasi *state centric*, di dalam penelitian ini akan menggunakan paradigma neomerkantilisme.

Perangkat paradigma neomerkantilisme merupakan sebuah format paradigma ekonomi nasionalis yang berupaya menggiring pasar ke dalam kepentingan nasionalnya. Dalam pengertiannya, neomerkantilisme tidak memandang pasar sebagai sebuah indikator yang bertentangan dengan kedaulatan dan kepentingan negara, melainkan menempatkan pasar sebagai sebuah daya ungkit yang proporsional bagi negara dalam mengupayakan kemakmuran ekonomi dan kedaulatan negara (Krasner, 1978:). Relevansi premis tersebut selaras dengan upaya negara untuk meminimalisir kegagalan pasar dan tidak ikut terenyak dalam laba jangka pendek yang ditawarkan oleh doktrin *free-market capitalism*. Berbeda dengan merkantilisme klasik yang menitikberatkan agenda keamanan sebagai daya ungkit melalui aktivitas ekonominya, neomerkantilisme berupaya memfokuskan kepentingannya melalui peningkatan industrialisasi.

Menurut Ma'Soed (1998:6) neomerkantilisme merupakan transformasi dari bentuk merkantilisme klasik dalam menghadapi interdependensi ekonomi global. Di antara garis abu-abu yang menyebabkan aktivitas ekonomi global tidak dapat lagi dibedakan di dalam wilayah kedaulatan, negara harus lebih canggih dalam menerapkan kebijakan proteksionisme dengan menggunakan instrumen moneter dan pembatasan investasi serta arus kapital (Ma'Soed, 1998:10). List meruntukan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perspektif neomerkantilisme (Falkner, 2011:20-23); pertama adalah proteksionisme, promosi *infant industry* atau Badan Usaha Milik Negara, pendidikan dalam SDM serta

infrastruktur pasar. Keempat perangkat tersebut difungsikan sebagai alat untuk mencapai kontrol yang absolut dalam mencapai kemakmuran bangsa dan keamanan nasional sebuah negara.

Berangkat dari justifikasi yang sama seperti neorealisme, neomerkantilisme memandang tatanan dunia yang anarki menyebabkan situasi kompetitif di dalam perdagangan internasional. Sehingga mendorong negara untuk memaksimalkan kekuatan relatifnya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara (Morgenthau, 1978). Gagasan imperatif negara dalam menempatkan kontrol tertinggi (*commanding heights*) bukan hanya kepentingan makroekonomi saja, justru negara memastikan keuntungan bisnis dengan basis perusahaan negara yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau *state own firm* maupun perusahaan asing melalui kebijakan resmi negara (Grygiel, 2006). Para ekonom klasik memandang relasi di antara MNCs dan FDI dalam ekonomi global terjadi hanya dalam lingkungan politik yang menguntungkan. MNCs tidak semata-mata tumbuh karena kekuatan pasar atau strategi perusahaan, melainkan lingkungan politik internasional yang menguntungkan dan diciptakan oleh kekuatan dominan yang menjunjung kepentingan ekonomi dan keamanannya, sehingga mendukung internasionalisasi dan liberalisasi ekonomi (Doremus, 1998). Ekonom merkantilis juga berasumsi bahwa perusahaan multinasional pada dasarnya adalah perusahaan nasional yang bersaing satu sama lain di seluruh dunia.

Persis seperti Pax Britannica menyediakan lingkungan internasional yang menguntungkan untuk ekspansi luar negeri oleh perusahaan-perusahaan dan investor Inggris di akhir abad ke-19, maka kepemimpinan Amerika setelah Perang

Dunia II memberikan lingkungan internasional yang sama-sama menguntungkan untuk ekspansi luar negeri perusahaan-perusahaan Amerika dan kapitalis lainnya di era pasca-Perang Dunia II. Pada 1980-an dan 1990-an, Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang semuanya memiliki minat untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat kondisi internasional yang disukai MNC.

Negara kapitalis memiliki keterikatan konstitutif dengan struktur pasar. Untuk mengatur regulasi yang kapital, negara harus membawa koherensi terstruktur di antara struktur ekonomi dan suprastruktur politik negara. Koherensi tersebut menggiring paradigma negara ke dalam sistem tertutup dan produksi yang mandiri. Institusi negara harus mengartikulasikan kepentingan ekonomi sebagai kepentingan yang universal—dan disebutkan oleh Jessop dan Sum sebagai *'decisive economic nucleus'*. (Jessop & Sum, 2006) Akumulasi strategi tersebut dibangun ke dalam konteks yang selektif secara strategis karena negara kapitalis cenderung mengalami ketergantungan (*path dependence*) dengan negara tujuan ekspor dan mekanisme pasar yang relevan (Jonsson, 1993:49-97).

State capitalism acap kali dilabeli sama dengan neomerkantilisme. Namun, penekanannya lebih kepada interpretasi terhadap negara di dalam sikap kapitalistiknya untuk mengupayakan nilai tambah ekonominya. Ryotaro Komiya beranggapan bahwa ekonomi merupakan sub-ordinasi atas tujuan sosial politik. Jepang merupakan salah satu bentuk negara kapitalis yang mengupayakan sektor industri dan teknologinya sebagai determinan kedaulatan negaranya sekaligus mengesampingkan militer sebagai pencapaian keamanan (Komiya, 1988). Tujuan politik negara melalui kebijakan ekonominya menjadi salah satu acuan riil bagaimana penerapan neomerkantilisme di Jepang menempatkan posisi negara

sebagai regulator yang melindungi sektor industri tertentu untuk meningkatkan daya saing internasional mereka dan mencapai "commanding height" di dalam ekonomi global (Yamamura, 1996)¹. Definisi negara kapitalis oleh Landauer dibagi menjadi sifat totalitarian dan format demokrasi. Konsep-konsep historis dari bentuk negara kapitalis adalah sebagai berikut:

- a) Pasar digulingkan dari fungsi kontrolnya ke koordinasi produksi dan distribusi. Fungsi ini telah diambil alih oleh sistem kontrol dan regulasi perdagangan (*a system of direct control*) Kebebasan perdagangan, perusahaan dan tenaga kerja tunduk pada campur tangan pemerintah sedemikian rupa sehingga mereka praktis dihapuskan.
- b) Kontrol-kontrol ini berada di negara bagian yang menggunakan kombinasi perangkat lama dan baru, termasuk "*pseudo-market*", untuk mengatur dan memperluas produksi dan mengoordinasinya dengan konsumsi. Pekerjaan penuh semua sumber daya diklaim sebagai pencapaian utama di bidang ekonomi oleh negara.
- c) Di bawah bentuk totaliter kapitalisme negara, negara adalah instrumen kekuasaan kelompok penguasa baru, yang dihasilkan dari penggabungan kepentingan terselubung yang paling kuat, personel papan atas dalam manajemen industri dan bisnis, strata yang lebih tinggi dari birokrasi negara (termasuk militer) dan tokoh-tokoh utama

¹ Di antara banyak studi penting ekonomi Jepang, beberapa harus disebutkan seperti: Yasusuke Murakami, Sebuah Analisis Politik-Ekonomi Antikletik: Sebuah Pilihan untuk Abad Berikutnya, ed. dan trans. Kozo Yamamura (Stanford: Stanford University Press, 1996), adalah interpretasi yang brilian tentang sifat khas ekonomi Jepang; Takatoshi Ito, Ekonomi Jepang (Cambridge: MIT Press, 1992), adalah survei dan analisis ekonomi Jepang yang sangat berguna; Bai Gao, Ideologi Ekonomi dan Kebijakan Industri Jepang: Developmentalism dari tahun 1931 hingga 1965 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), adalah sejarah dan evaluasi yang luar biasa dari kebijakan industri Jepang.

birokrasi partai pemenang. Setiap orang yang tidak termasuk dalam kelompok ini hanyalah objek dominasi (Landauer, 1939:498).

2.2.2. Keterkaitan Paradigmatik di Antara Negara dan MNCs

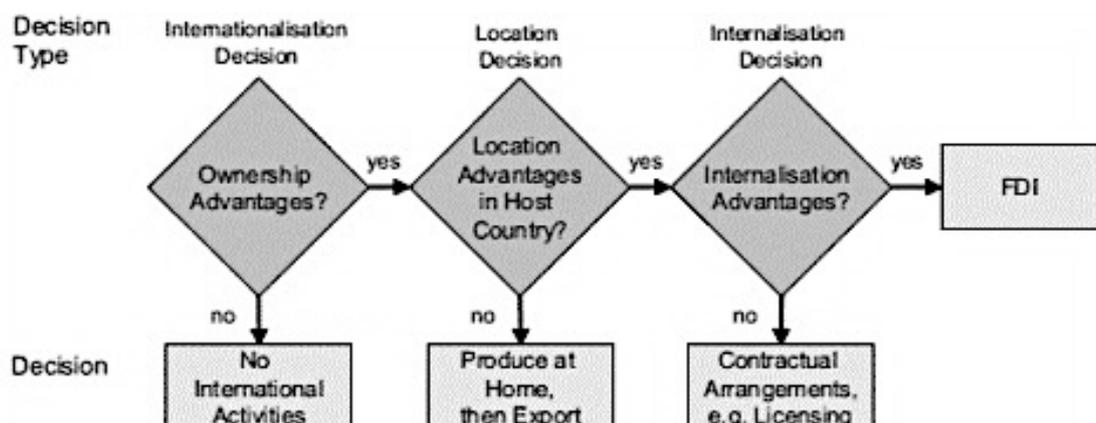
Eksposisi tentang bagaimana peran MNCs di dalam aktivitas perdagangan global bukan semata-mata cuma menyoal *market power* atau strategi perusahaan (Gilpin, 1975), kendati FDI dan internasionalisasi produksi mengubah sifat urusan ekonomi dan politik internasional dengan cara melemahkan negara dan mengintegrasikan kepentingan perusahaan ke dalam ekonomi nasional. Transformasi menuju struktur interdependensi yang dipimpin oleh dominasi dan kontrol MNCs semakin ekspansif dan melebihi kedaulatan sebuah negara berkembang. Walaupun tidak dapat dipungkiri, dalam studi ekonomi politik global perdebatan yang dilematis tentang peran negara dalam meningkatkan interdependensi atau mempertahankan kemandirian ekonomi dan otonomi politik negara menjadi ajang yang semakin melelahkan. Rezim *free market capitalism* menempatkan negara ke dalam gravitasi pasar bebas itu sendiri, sehingga intervensi negara dituding akan mendistorsi pasar dan berisiko terhadap kesejahteraan negara serta jumlah produksi yang lebih sedikit.

Kritik neoliberal dalam wilayah moneter negara, menganggap bahwa nilai tukar dan mata uang sebaiknya diserahkan kepada pasar. Pandangan neoliberal mengemukakan bahwa sistem nilai tukar dan mata uang mengambang merupakan maksimalisasi atas penguatan pasar untuk mendorong efisiensi dan kedisiplinan ekonomi. Tentu saja, pandangan neoliberal merupakan kritik terhadap pandangan *economic nationalist* (atau disebut merkantilis dalam kajian ekonomi politik

internasional); dimana merkantilisme mewajibkan negara industri menjalankan kebijakan proteksionis untuk melindungi industri infant-nya, dengan harapan kenaikan surplus perdagangan untuk memberikan keuntungan yang optimal bagi keamanan nasional.

Dunning menitikberatkan kesuksesan ekonomi yang luar biasa dari MNCs disebabkan oleh karakteristik atas keuntungan kepemilikan, lokasi dan internalisasi yang lebih unggul ketimbang perusahaan domestik (Gilpin, 2001:287). Kemajuan revolusioner terhadap komunikasi, transportasi dan teknologi mengurangi biaya transaksi dan internasionalisasi. MNCs biasanya memiliki beberapa keuntungan khusus dengan agenda eksploitasi dalam pasar oligopolistik untuk meningkatkan keuntungan monopoli dan *market power* terutama dalam menekan biaya operasional lainnya (Caves, 1982). Teori ekletik Dunning tidak secara esensial menjelaskan karakteristik MNC sebagai pelaku strategis ekonomi global. Caves menekankan bahwa faktor dari keunggulan MNCs selain cenderung relatif dan bersifat oligopolistik, ada tiga komponen utama yang dominan, yaitu *ownership advantages*, *location advantages* & *internalization advantages* (O-L-I) (Gilpin, 2001:288).

Skema 2.1. Teori Ekletik Dunning, O-L-I (Gilpin, 2001)



Ownership advantages mengacu pada aset tidak berwujud, yang setidaknya untuk sementara waktu memiliki perusahaan dan dapat ditransfer dalam perusahaan transnasional dengan biaya rendah dan mengarah ke pendapatan yang lebih tinggi. Dengan demikian untuk berhasil memasuki pasar asing, perusahaan harus memiliki karakteristik tertentu yang akan unggul atas biaya operasi di pasar asing. Keunggulan ini adalah kompetensi properti atau manfaat spesifik perusahaan. Perusahaan memiliki monopoli atas keunggulan spesifiknya sendiri dan menggunakannya di luar negeri sehingga mengarah pada profitabilitas marjinal yang lebih tinggi atau biaya marjinal yang lebih rendah daripada pesaing lain. Hal tersebut direpresentasikan oleh Dunning ke dalam tiga keunggulan spesifik dari MNCs, yaitu:

- a) keuntungan monopoli dalam bentuk akses istimewa ke pasar melalui kepemilikan sumber daya alam terbatas, paten, merek dagang;
- b) teknologi, pengetahuan didefinisikan secara luas sehingga mengandung semua bentuk kegiatan inovasi;
- c) ekonomi dengan ukuran besar seperti ekonomi pembelajaran, skala ekonomi dan ruang lingkup, serta akses yang lebih besar ke modal keuangan (Dunning, 1988).

Locational advantages merupakan indikator berikutnya setelah kondisi pertama terwujud. Skema kondisi berikutnya terkadang hanya dianggap relevan dalam aktivitas perdagangan trans-nasional. Namun, dalam menentukan keunggulan spesifiknya mengacu pada poin-poin berikut ini:

- a) manfaat ekonomi terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif produksi, biaya transportasi, telekomunikasi, ukuran pasar, dll;

- b) keuntungan politik: kebijakan pemerintah umum dan khusus yang mempengaruhi aliran FDI;
- c) keuntungan sosial: termasuk jarak antara negara dan negara asal, keanekaragaman budaya, sikap terhadap orang asing dll;

Karakteristik ketiga dari kerangka ekletik Dunning merupakan tahap terakhir di mana perusahaan akan mempertimbangkan strategi dalam mengeksploitasi kekuatannya. Perusahaan akan lebih tertarik dalam aktivitas pasar lintas batas dan mengupayakan produksi asing. Di sisi lain, FDI menyebabkan perusahaan domestik menjamur dan berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi. Hanson berpendapat bahwa efek positif dari FDI tidak signifikan, dan cenderung membawa pasar pada kutub yang negatif. Kecenderungan lainnya berada pada sektor mana yang menjadi tujuan investasi (Hanson, 2001). Menurut Hirschman, sektor pertambangan dan agrikultur memiliki kecenderungan keuntungan yang sangat terbatas (Hirschman, 1958). Kindleberger menjustifikasi keberadaan FDI disebabkan oleh kehadiran pasar yang tidak sempurna (*imperfect market*), dan apabila fungsi kompetitif pasar sempurna, maka FDI tidak akan ada (Kindleberger, 1969:11-12). Kindleberger percaya bahwa distorsi pasar disebabkan oleh beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya investasi langsung. Dua kondisi tersebut yang juga menjadi perhatian Hymer yaitu:

- perusahaan asing harus memiliki keunggulan tertentu yang memungkinkan untuk melakukan investasi yang layak;
- pasar yang menguntungkan bagi investasi merupakan pasar yang tidak sempurna (Kindleberger, 1969).

Dalam studi kasus kebijakan perdagangan tembaga oleh pemerintah Indonesia dan PTFI, internalisasi yang dilakukan oleh anak perusahaan dari Freeport McMoran Gold & Copper Inc. sebagai perusahaan induk berhasil menstimulus proses internalisasi berupa akuisisi saham dengan nominal 81,28 % di dalam Kontrak Karya II oleh PTFI dengan keuntungan spesifik di dalam batas-batas anak perusahaan tersebut (tenaga kerja murah, ekspansi dari FDI) (Media Komunikasi Freeport, 2014). Sangat jelas di era Kontrak Karya PTFI berhasil menginternalisasi lokasi industri atas *locational advantages* terhadap kontrol faktor produksi global yang fleksibel, sekaligus mengeksploitasi keuntungan komparatif dari sektor tambang Indonesia terutama tembaga. Walaupun berisiko menurunkan spesifikasi kompetisi antar firma di perusahaan induk, ekspansi FDI cenderung dialokasikan secara bertahap dengan afirmasi pasar global (*manage across border*).

Sebagai contoh, Hymer meninjau pola interaksi negara dan MNC melalui *quasi-Marxist of the MNC* (Cox, 1987) bahwa sebuah perusahaan tumbuh di dalam ukuran dan cakupan batas-batas negara, menciptakan *core/peripheral structure* yang hierarkis dan mendorong kendali atas monopoli kapitalis. Karena ukuran firma yang besar dengan kapabilitas dan kekuatan monopoli yang setara dengan negara (bahkan lebih), MNC mengendalikan eksploitasi terhadap sumber daya tertentu melalui FDI yang semakin masif (Gilpin, 2001:288). Dari beberapa pendekatan terhadap pola aktivitas MNC dan negara dengan studi kasus perdagangan tembaga Indonesia yang dimainkan oleh Indonesia, PTFI dan perusahaan domestik, pastinya akan mengkonklusikan beberapa kemungkinan sikap antar aktor yang berbeda. Kecenderungan perilaku antar subjek memiliki

implikasi terhadap formulasi skenario-skenario strategis; terutama dalam mendekonstruksi ketentuan di dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang mengalami stagnasi dan berisiko terhadap faktor produksi dan operasional industri tembaga.

2.2.3. Keseimbangan Daya Tawar (*Balance of Bargaining Power*) di Antara Negara dan MNC

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembatasan di antara sub-komponen arus finansial domestik dan modal asing mengalami pembiasan akibat doktrin neoliberalisme di wilayah moneter dan finansial negara. Dalam upaya menelaah dominasi dan posisi tawar negara, Dunning menyebutkan adanya pengurangan restriksi terhadap MNCs dalam aktivitas bisnisnya menyebabkan peningkatan nominal FDI yang komplementer (Dunning, 1991: 225-244). Tak dapat dipungkiri, arus modal asing sejak tahun 1990 menjustifikasi hubungan negara dengan MNCs sebagai transfer teknologi manufaktur yang menguntungkan dan kooperatif. Dengan demikian, asumsi terjadinya negosiasi yang kooperatif ataupun non-kooperatif akan menghasilkan kesepakatan investasi di antara negara dan MNCs. Motif restriksi yang dihasilkan atas kesepakatan tersebut, biasanya berupa pembatasan FDI ke dalam negara, persyaratan ketenagakerjaan asing dan pembatasan akses komoditas strategisnya.

Di dalam literatur yang ditulis oleh Stopford dan Strange, interaksi tawar menawar dalam menentukan dominasi antar negara (atau disebut *Host-State* di dalam paradigma bisnis internasional) memiliki kecenderungan untuk menaikkan *bargain* sebuah *Host-State* tanpa mengesampingkan kepentingan bersama di level domestik (Stopford & Strange, 1991). Begitupun Grosse menegaskan pola

aktivitas MNCs bermuara pada koordinasi *bargaining* negara yang lebih dominan atau belum tentu dominan sesuai dengan domain kesempatan yang ditawarkan (Grosse, 2005: 251-71). Studi tradisional mengenai tawar menawar dan negosiasi dominan dua aktor tersebut dinamakan sebagai *Obsolencing Bargaining Model (OBM)*. Bennet dan Sharpe mengindikasikan keseimbangan daya tawar di antara negara dan MNCs tidak dapat mencapai titik *equilibria* apabila mengikuti perkembangan rezim moneter dan arus kapital (Bennet & Sharpe, 1979:57-89). Indikator yang menjadi kerentanan, yakni: (1) *pengambilalihan perusahaan*, (2) *perubahan regulasi yang merugikan*, (3) *renegosiasi kontrak kerja* & (4) *persyaratan operasional kerja* (Grosse, 2005).

Merujuk pada model 'Behrman-Grosse', ada tiga dimensi yang menjadi preferensi di antara pemerintahan negara dan bisnisnya; *relative resource*, *relative stakes* dan *similarity of interest*. Model tersebut mengakumulasi kemungkinan terhadap daya tawar yang seimbang di antara aktor yang bernegosiasi. Skema triangular yang ditawarkan oleh Behrman-Grosse tidak lepas dari konsep yang lebih dikenal sebelumnya sebagai 'triangular diplomacy'. Walaupun model OBM merupakan perangkat proporsional dalam menganalisa kompetisi dan kerja sama di antara negara dan MNCs, konsep triangular tersebut melebihi jangkauan OBM dalam memproyeksikan daya tawar di antara *state-state*, *state-firm (MNCs)* dan *firm-firm* (Behrman & Grosse, 1990). Unit analisis dari konsep-konsep tersebut memiliki persamaan, walaupun titik beratnya adalah MNCs. Skenario tersebut dianggap terlalu MNCs-sentris. Kritik terhadap model dan skenario tersebut, juga berada pada wilayah *structural power* yang dimiliki oleh MNCs dan mengesampingkan mobilitas negara sebagai *capital goal-directed*.

2.2.3.1. *State-centric Model of Bargaining*

Dalam menindaklanjuti kesenjangan konsep analisis relasi negara dan MNCs, Matthew menjelaskan bahwa upaya untuk mendorong kapasitas negara di dalam *bargaining entry* yaitu berada pada atribut pemerintahan negara itu sendiri (Matthews, 2012:281-93). Matthews menganggap bahwa negara didefinisikan sebagai '*a goal-directed*' di dalam konsep tujuan kolektif di antara aktor negara dan MNCs. Asumsi tersebut dipertegas oleh Pierre dan Peters bahwa negara tetap menjadi aktor utama di dalam masyarakat dan merupakan ekspresi dominan dari kepentingan bersama. Maka, tiga variabel dalam menentukan model daya tawar yang *state-centric*, yaitu *state capacity*, *administrative capacity* dan *institutional capacity*. (Peters & Pierre, 2006:209-22).

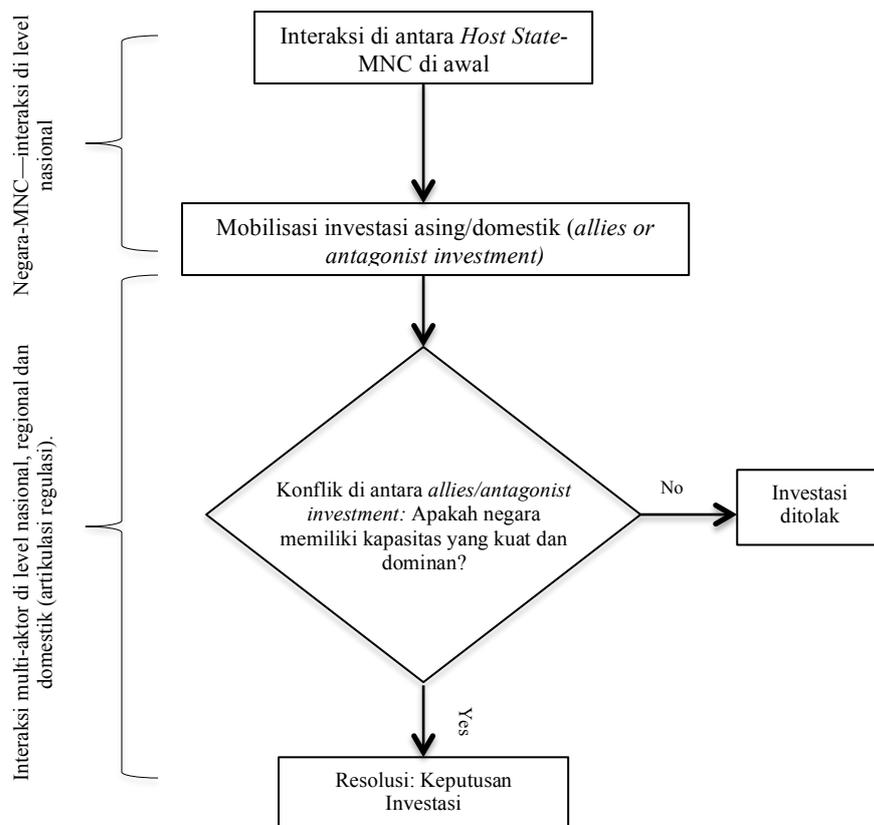
Moon dan Lado menekankan aspek penting pada dinamika hubungan daya tawar (*bargaining power relationship*) yang relatif di antara negara dan MNCs. Possibilitas persamaan kepentingan yang tinggi menghasilkan regulasi yang rendah dan kebijakan insentif yang tinggi (Behrman & Grosse, 2005). Sehingga, relasi daya tawar di antara kedua subjek dominan jarang menemukan pertentangan dan cenderung berujung pada kesepakatan kerjasama. Apabila mengacu pada konsep OBM, pandangan bahwa MNC merupakan subjek utuh di antara relasi tawar menawar yang hanya menitikberatkan 'hasil' dari negosiasi, maka dimensi politis dari proses negosiasi tersebut hanya akan bertumpu pada relasi dua aktor. Menurut Ramamurti, proses tersebut merupakan tawar menawar *two-tier multi-party*.

Kane menggunakan konsep 'dialektika regulasi' untuk menjelaskan regulasi finansial sebagai proses dinamis dari konflik dan resolusi antara kekuatan

politik dan ekonomi yang berlawanan (Kane, 1981:355-67). Kane berpendapat bahwa: “... *introducing political power into economic affairs initiates a dialectical process of adjustments and counter adjustments.*”

Merujuk pada pernyataan Kane, konflik dialektis akan selesai dengan sendirinya di dalam proses tersebut. Proses tawar menawar terdiri dari fase mobilisasi, konflik dan resolusi yang melibatkan para aktor yang berinteraksi di beberapa level tertentu. Hasil proses tersebut apabila merujuk pada skema 2.2. menghasilkan keputusan yang berkaitan dengan investasi dan menentukan posisi negara pada hasil negosiasi yang relevan dengan kapasitas perangkat negara.

Skema 2.2. Model Skenario Interpretasi *State-centric*



2.2.4. Keterkaitan Paradigmatik di antara Pasar Tembaga dan Kebijakan Perdagangan

Pendekatan metodologis terhadap paradigma pasar di dalam Hubungan Internasional didasari pada sifat natural dari pasar itu sendiri. Gary Becker di dalam tulisannya yang berjudul *The Economic Approach to Human Behaviour* menekankan basis atas kajian ekonomi di dalam ilmu sosial dan politik berada pada beberapa poin berikut ini (Becker, 1976:3-14):

- (1) Ekonomi mengasumsikan perhitungan tujuan akhir, atau memaksimalkan perilaku secara lebih luas dan eksplisit daripada ilmu sosial lainnya.
- (2) Perilaku rasional atau maksimal memandu upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan "preferensi stabil".
- (3) Pasar berkembang secara alami untuk mengoordinasikan, dengan berbagai tingkat efisiensi, aksi-aksi dari para peserta yang berbeda. Preferensi Becker tersebut menjustifikasi bahwa perilaku metodologi individualisme (atau dianggap sebagai perilaku rational choice) yang di mana menempatkan individu sebagai aktor rasional di dalam ekonomi.

Doktrin bahwa pasar tidak perlu diintervensi, menjadi dasar bahwa pasar merupakan mekanisme *self-regulating & self-correcting* di dalam mekanisme fundamental yang mendorong sistem pasar bebas. Adam Smith mengklaim bahwa pola individualistik di dalam transaksi sosial tersebut sebagai interaksi-interaksi di antara individu yang berkesinambungan di dalam pasar (*invincible hand*). Fritz Machlup beranggapan bahwa peran rasional dari interaksi individu-individu

tersebut menghasilkan *variable of price (p)* dan *variable of quantity (q)*. Machlup melanjutkan keterkaitan variabel tersebut ke dalam konsep *static equilibrium* atau disebut sebagai keseimbangan statis pasar. Suatu keseimbangan muncul ketika tidak ada kecenderungan untuk keseimbangan antara variabel-variabel yang saling terkait seperti (*p*) dan (*q*) untuk berubah (Machlup, 1991: 43-72). Dalam bahasa yang non-teknis, keseimbangan berarti bahwa tidak ada pelaku ekonomi yang memiliki insentif untuk mengubah perilakunya dan biaya dan manfaat dari situasi yang ada dinilai telah mencapai keseimbangan terbaik yang secara wajar dapat diharapkan seorang individu. Oleh karena itu, keuntungan potensial dari mengubah situasi tidak sebanding dengan biaya potensial, sehingga tidak terjadi perubahan. Maka, karakteristik dari dinamika pasar yang terus mengalami ketetapan yang berubah-ubah disebutkan oleh Machlup menjadi poin-poin berikut ini; (1) *changes in relative prices in the exchange of goods and services*, (2) *competition as a determinant of individual and institutional behavior*, and (3) *the effect of efficiency in determining the survivability of economic actors*.

Perilaku fundamental pasar yang rasional dalam memaksimalkan kepentingan individu, diasumsikan sebagai akibat adanya pasar yang tidak sempurna. Pasar oligopolistik menekankan pentingnya inovasi teknologi dan memanfaatkan sejarah atau *path dependence* sebagai variabel penjelas (Arthur, 1990: 92-99). Dalam karakteristik pasar oligopolistik kekuatan dan strategi sangat mempengaruhi *outcomes* yang menjustifikasi perbedaan prediksi pada ekonom klasik. Kompetisi oligopolistik tersebut dipengaruhi oleh aktor pasar yang secara simultan menggunakan *market power*-nya untuk memanipulasi rasio pertukaran (*rate ratio*) (Hicks, 1974: 23-25). Konsep equilibrium ekonom klasik pada pasar

persaingan sempurna hanya memiliki satu domain keseimbangan, sedangkan dalam doktrin pasar tidak sempurna banyak kemungkinan *outcomes*, *power* dan strategi perdagangan oleh aktor dagang.

2.2.4.1. Pasar Persaingan Tidak Sempurna dan Rezim Pasar Oligopolistik

Menurut G. Mankiw, pasar persaingan tidak sempurna merupakan suatu kondisi variabel pasar yang tidak mencapai kuotasi yang seimbang (*equilibrium*) (Mankiw, 2006:195) Bentuk-bentuk pasar tidak sempurna didiferensiasikan oleh Mankiw ke dalam 3 kategori pasar yakni; pasar monopoli, pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Suatu perusahaan disebut monopoli (*monopoly*) jika perusahaan tersebut merupakan satu-satunya penjual suatu barang dan barang tersebut tidak ada substitusinya. Penyebab yang paling mendasar dari munculnya monopoli adalah hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Suatu monopoli terus menjadi pemain tunggal di pasar karena perusahaan-perusahaan lain tidak mampu masuk ke dalam pasar tersebut dan bersaing dengannya. Hambatan untuk masuk ini timbul akibat tiga hal utama, yakni: (1) Suatu sumber daya inti hanya dimiliki oleh satu perusahaan; (2) pemerintah memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan untuk membuat atau jasa tertentu; dan (3) biaya produksi barang tersebut untuk satu produsen efisien daripada banyak produsen. Sedangkan, struktur pasar monopolistik pada dasarnya sama dengan yang terdapat pada struktur pasar persaingan murni, hanya saja pada struktur pasar persaingan monopolistik diperkenalkan diferensiasi produk dan adanya sedikit kekuatan pasar bagi produsen guna mengatur keadaan pasar.

Pasar oligopoli adalah pasar dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permintaan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari keputusan para pesaing mereka. Usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka.

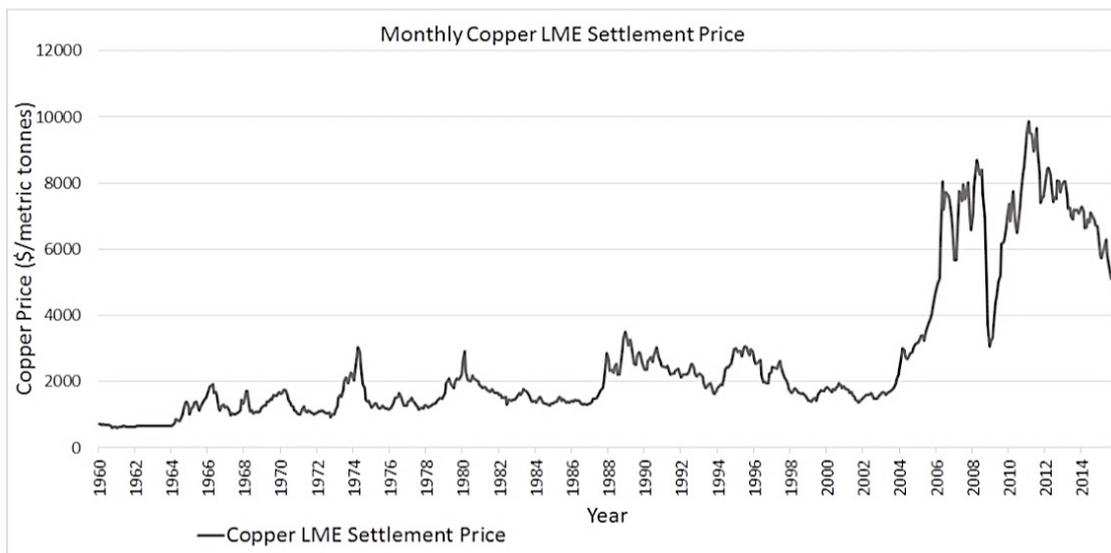
2.2.4.2. Tren Pasar Tembaga dan Rezim Perdagangan Tembaga di Pasar Global

Pasar tembaga merupakan pasar yang dinamis serta kompleks dalam skenario faktor permintaan dan harga. Dekade ini, situasi perdagangan tembaga mengalami eskalasi terhadap permintaan serta harga secara fundamental. Hal ini dikaitkan dengan industrialisme dan lompatan teknologi serta kebutuhan industri manufaktur terhadap tembaga sebagai bahan baku produksi. Ukuran pasar global untuk tembaga mencapai US\$D 150 miliar setiap tahun. US Geological Survey (USGS) memperkirakan pada tahun 2013 sumber daya tembaga berbasis lahan global lebih dari 3,1 miliar ton, sedangkan 690 juta ton terdaftar sebagai cadangan (USGS, 2014). Perkiraan ini meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun 1970 karena produksi tembaga dunia yang ditambah setiap tahun meningkat. Sebagai manfaat tambahan, pemrosesan ulang berkontribusi secara signifikan terhadap jumlah tembaga olahan yang tersedia, dengan perkiraan berkisar antara 20-30% dari produksi tembaga olahan tahunan.

Lonjakan perubahan perilaku dari karakteristik pasar tembaga disebabkan spektrum pasar global yang menemui fenomena resesi, krisis dan ketidaksiapan

perusahaan serta negara dalam mengakomodasi operasional industri pertambangan mineral. Skenario pasar tembaga tersebut apabila merujuk pada *The Hague Centre for Strategic Studies (2012)* di dalam penelitiannya berjudul "*Futures for Copper*" mengakumulasikan kemungkinan aktor pasar tembaga dalam reaksinya terhadap skenario-skenario 'baru' terutama pada perspektif industri ekstraksi. Pikiran mendasar terhadap kemeriahan pasar tembaga, menurut Cortez dan Sammuth berada pada gagasan di mana pasar tembaga memiliki karakteristik yang kacau dan tidak tunduk pada peristiwa acak (Cortez & Saydam, 2015: 261-272).

Grafik 2.1. Trends of Copper Settlement Price



Sumber: *LME.com*

Di sisi lainnya, Edelstein di dalam menganalisis pasar tembaga, ia memproyeksikan hubungan kausalitas di antara peristiwa ekonomi dan politik internasional terhadap perkembangan pasar tembaga (Edelstein, 2010). Jika ekonomi tumbuh, maka permintaan untuk konstruksi baru dan lebih banyak

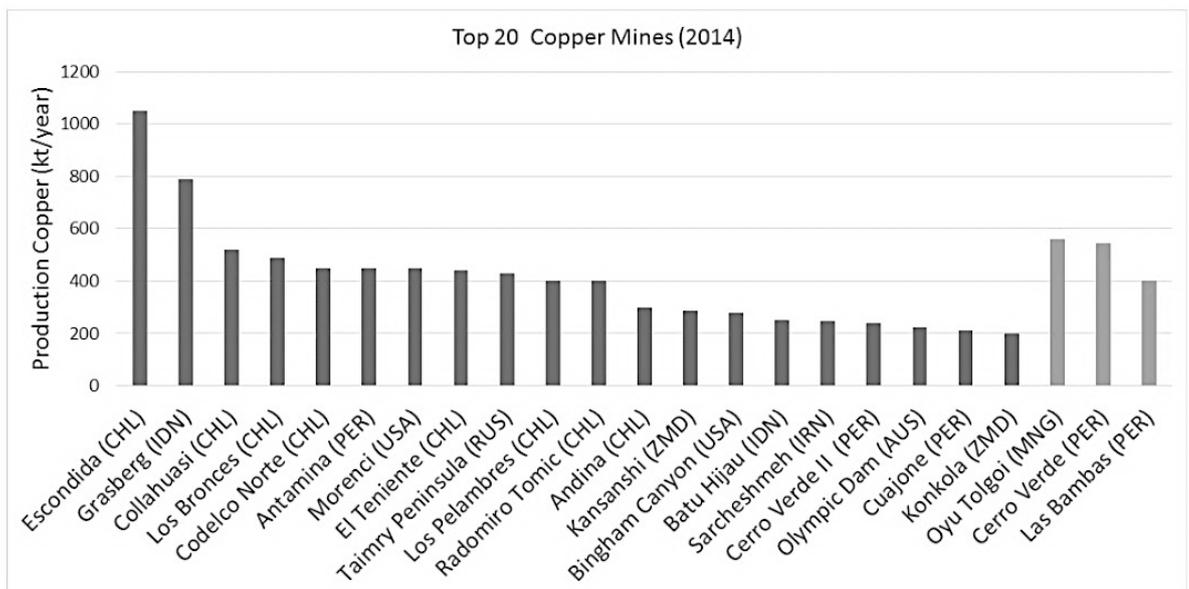
tembaga juga tumbuh seiring dengannya. Bangunan menyumbang sekitar setengah dari semua penggunaan tembaga, dengan akuntansi teknik hampir 25%, dan aplikasi listrik terhitung sekitar 17%. Pertumbuhan ekonomi Asia khususnya yang menyumbang 50% dari seluruh penggunaan tembaga, merupakan faktor lonjakan harga dan permintaan termasuk industrialisasi China dan India (Black, 2015).

Demand & Supply

Faktor yang paling fundamental pada pasar tembaga adalah *demand & supply*. Sekitar 50% dari produksi tembaga utama dilakukan oleh dua puluh perusahaan tambang di dunia. Di mana 10 perusahaan menghasilkan hampir 50% dari semua tembaga primer. Pasokan tembaga berasal dari dua sumber utama, penambangan dan daur ulang, juga disebut sebagai produksi primer dan sekunder. Penambangan tembaga terjadi di semua benua, tetapi Amerika Latin, terutama Chili dan Peru, menyumbang lebih dari 40% dari cadangan global, sementara Chili menyumbang sekitar sepertiga dari produksi tambang global pada tahun 2009 (ICSG, 2018). Kapasitas pabrik peleburan dan pemurnian juga sangat regional, karena China memproduksi sekitar 24% dari *output* pabrik peleburan global dan *output* kilang serupa. Bagian relatif rata-rata dari pasokan tembaga sekunder, juga disebut *Recycling Input Rate* (RIR), secara global hanya lebih dari 30%, di Eropa lebih dari 40% dan di Jerman lebih dari 55%. RIR terutama dipengaruhi oleh pengumpulan produk pada akhir masa pakainya (produk EOL) dan efisiensi proses daur ulang (*Recycling Efficiency Rate* atau RER).

Demand & supply dalam pasar tembaga global sangat dipengaruhi oleh dua perspektif utama, yaitu kebutuhan yang berbeda dari konsumen tembaga dan penambangan, pemurnian serta konsumsi regional tembaga. Salah satu indikator yang menentukan *supply* tembaga yaitu indikator geologis yang dibagi ke dalam dua jenis: *porphyry copper deposit & sediment hosted copper deposit*. Kedua jenis deposito ini menyumbang 90-95% dari deposit tembaga yang ditambang di seluruh dunia. Pada tahun 2005 terdapat 381 deposit porfiri, yang mengandung 1336 Mt tembaga (USGS, 2005), dan 141 endapan tembaga yang dihuni sedimen pada tahun 2003 dan mengandung 383 Mt tembaga. Yang menarik dari karakteristik pasar tembaga terhadap *demand & supply*-nya berada pada fenomena *small boom bust visible* yang memiliki kausalitas terhadap harga tembaga di pasaran.

Grafik 2.2. Top 20 Copper Mines



Sumber: (ICSG 2014, Rio Tinto 2016a, Mining.com 2015c, Freeport McMoRan 2015)

Pada sisi permintaan, pertumbuhan global Industry Production (IP) rata-rata sekitar 2% per-tahun selama 2011-16, ini merupakan tingkat yang sangat rendah. Tahun 2017-20, BME (*Bloomsburry Mineral Economics*) mengharapkan rata-rata menjadi sedikit lebih cepat pada 2,5%, meskipun itu masih tanpa volatilitas. Pertumbuhan konsumsi tembaga global selama 2011-16 rata-rata 2,6% per-tahun dan diperkirakan pertumbuhan konsumsi sedikit lebih cepat selama 2017-20, dari 3,4% per tahun. Intensitas penggunaan tembaga dalam IP global tampaknya meningkat sedikit kurang dari 1% per tahun, terutama berkat sifat intensif tembaga dari stimulus pembangunan konstruksi di Cina.

2.2.4.3. Peran Negara dalam Tata Kelola Perusahaan dan Praktik Bisnis Swasta

Kontra-argumen terhadap doktrin pasar yang mengenyahkan intervensi negara ke dalamnya berada pada fragmentasi pasar itu sendiri. Wacana neoliberalisme, menganggap fragmentasi atau diversifikasi pasar tersebut merupakan '*lack of political coordination*' (Breyer & Stewart, 1979). Menurut Breyer dan Stewart, otoritas negara dalam wilayah administratif serta hukum terhadap kebijakan ekonominya dijustifikasi dengan adanya indikasi '*market failure*' yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi itu sendiri. Negara melalui pemerintahannya mengaktifkan perannya di dalam konsep kekuatan monopoli, eksternalitas negatif dan informasi konsumen yang tidak memadai (*moral hazard*).

Salah satu contoh studi kasus yang dapat menjadi tinjauan sistem kebijakan ekonomi dan industri adalah Amerika Serikat. Kebijakan industri Amerika mengacu pada upaya yang disengaja oleh pemerintah untuk menentukan

struktur ekonomi melalui perangkat seperti subsidi keuangan, perlindungan perdagangan (*trade protectionism*), atau pengadaan pemerintah (*government procurement*). Amerika Serikat menetapkan kebijakan industri nasional sejak tahun 1980 yang merupakan kebijakan spesifik perusahaan yaitu; “*pork barrel politics*”. Kebijakan pemerintah yang mendukung Chrysler dan Harley Davidson pada tahun-tahun ketika mereka diancam dan dianggap sebagai kebijakan khusus perusahaan privat yang berhasil digelontorkan. Justifikasi atas intervensi pemerintah ke dalam sektor industri tersebut bukan tanpa sebab, melainkan untuk mengupayakan nilai tambah (*value added*) terhadap faktor produksi domestik dengan mengasosiasikan kepentingan industri dengan kepentingan nasional.² Untuk Amerika Serikat sendiri sektor yang diproteksi melalui kebijakan industri adalah sektor teknologi dan industri komputer.

Di dalam sistem *shareholder capitalism* (Grossman, 1989) yang diterapkan Amerika, perusahaan didorong untuk mengoperasionalkan kekuatan pasarnya dalam meningkatkan profitnya kepada investor dan memiliki obligasi yang minimum terhadap variabel makroekonomi negara. Berbeda dengan Jepang dan Jerman yang berupaya mengokupasi kemampuan regulasi dan administratif negara untuk mengendalikan modal asing dan korporasi. Tren tersebut oleh Carl Kester disebut sebagai “*the global contest for corporate control*” (Kester, 1991).

Otoritas Jepang dalam mengoperasionalkan konsep ‘*commanding height*’ pada perangkat ekonomi nasionalisnya berakar pada sub-ordinasi komponen politik dan sosialnya di dalam masyarakat (Murakami, 1999). Kategori kebijakan

² Ditinjau melalui beberapa literatur singkat dari M. Donald Hancock, John Logue, and Bernt Schiller, eds., berjudul “*Managing Modern Capitalism: Industrial Renewal and Workplace Democracy in the United States and Western Europe*” (New York: Greenwood Press, 1991). Serta diskusi lanjutannya dikutip dari Keith Cowling and Roger Sugden, eds. *Current Issues in Industrial Economic Strategy* (New York: Manchester University Press, 1992).

ekonomi politik tersebut merupakan skema neomerkantilisme; negara memberlakukan asistensi, regulasi dan proteksionisme dalam industri unggulannya untuk menjadi daya ungkit kompetitif dalam perekonomian global. Beberapa istilah untuk merepresentasikan polah kapitalisme Jepang adalah Kapitalisme Shinto, kapitalisme negara yang dikembangkan, kapitalisme suku, kapitalisme kolektif, korporatisme yang baik, komunisme kompetitif, kapitalisme jaringan, perusahaan kapitalisme, kapitalisme produsen, kapitalisme pemangku kepentingan, kapitalisme strategis, dan, mungkin yang paling terkenal “Japan, Inc.”.

Asumsi terhadap kesuksesan ekonomi Jepang didasarkan pada skema *market conforming economic policies* dan koreksi atas ekonomi fundamentalnya (Grossman, 1990: 75-100). Upaya Jepang dalam memfasilitasi ‘*infant industry*’ menjadi salah satu faktor kesuksesannya dalam mengoperasionalkan kebijakan industrinya. Adapun beberapa kebijakan Jepang dalam mempromosikan industri infannya yaitu; 1) perpajakan, keuangan, dan kebijakan lain yang mendorong tingginya tingkat tabungan dan investasi; 2) kebijakan fiskal dan lainnya yang menjaga harga konsumen tetap tinggi, pendapatan perusahaan naik, dan mengurangi konsumsi, terutama barang asing; 3) kebijakan perdagangan strategis dan pembatasan impor yang melindungi industri Jepang terhadap barang impor dan pendirian anak perusahaan perusahaan asing; 4) Dukungan pemerintah untuk industri dasar, seperti baja, dan untuk teknologi generik, seperti penelitian bahan; (5) persaingan (*antitrust*) dan kebijakan-kebijakan lain yang menguntungkan.

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Posisi Daya Tawar (*Bargaining Power*) Negara Atas Regulasi Pertambangan

Aktivitas industri pertambangan di Indonesia diatur dalam regulasi tentang pertambangan bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada zaman penjajahan, regulasi mengenai pertambangan diatur dengan Indonesia Mijn Wet Stbl. 1899 yang berlaku tahun 1907, kemudian aturan tersebut pada tahun 1907 dirubah dengan menambah Pasal 5a dan dikenal dengan *5a contract*. Lalu, pada tahun 1930 muncul aturan yang dikenal dengan Mijn Politie Regelement (MPR) No.341 (Salim, 2006:128). Berikut adalah kronologi regulasi pertambangan di Indonesia;

- pada 1950 muncul mosi yang diprakarsai oleh Mr Teuku Mohammad Hasan di DPR untuk mengganti regulasi pertambangan produk Belanda dan pada tahun 1959 telah tersusun draft RUU pertambangan.
- Pada tahun 1959 disahkan UU No. 10 tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan yang ada di Indonesia sebanyak 2971 buah.
- Kemudian pada tahun 1961 dibatalkan lagi 4 buah. Pada tahun 1960 disahkan UU No. 37 PP Tahun 1960 tentang Pertambangan kemudian diubah menjadi UU No.11 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No 44 PP. Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi, PP No. 39 Tahun 1960 tentang Penggolongan Bahan Galian, kemudian diubah menjadi PP No. 25 Tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan Galian dan terakhir diubah menjadi PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.

- Pada tahun 2009 regulasi mengenai pokok- pokok pertambangan tersebut diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya ditulis UU Minerba.

Kontrak Karya³ merupakan suatu konsesi yang diperuntukkan bagi investor dan pengusaha pertambangan/penggalan sebagai akses penanaman modal asing (Sudrajat, 2013:67). Pemerintah Indonesia menganggap produk kontrak tersebut merugikan dan tidak merepresentasikan kedaulatan negara serta memposisikan negara sebagai pebisnis ketimbang perangkat pemerintahan yang berdaulat. Kemudian, adanya '*stabilization clause*' menjadi indikator yang menyudutkan bagi pemerintah. Ditambah dengan '*consesions agreement*' yang dilegitimasi oleh hukum positif domestik sehingga keterikatan yang rigid dan yurisdiksi tersebut mengharuskan pemerintah Indonesia untuk melakukan renegosiasi.

Alotnya proses renegosiasi UU Minerba terutama perubahan rezim Kontrak Karya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) menunjukkan posisi tawar negara yang lemah, di mana PTFI masih enggan untuk melakukan proliferasi terhadap UU Minerba. Sedapat-dapatnya ada 6 indikator KK yang tidak menguntungkan bagi Indonesia, yaitu mengenai penerimaan negara (*revenue sharing*), divestasi saham, kewajiban pengolahan konsentrat di dalam negeri, luas wilayah eksplorasi dan penggunaan jasa pertambangan di dalam negeri. Untuk itu

³ Dalam kontrak karya yang dilakukan, kesepakatan yang dilakukan antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia, Indonesia hanya memperoleh 1,5% sampai 3,5% dari hasil penjualan bersih tembaga dan 1% dari hasil penjualan emas dan perak. Hal ini tentu tidak sebanding dengan yang diperoleh PT Freeport Indonesia dari hasil tambang tembaga emas dan perak dari tanah papua. Persentase yang didapatkan pemerintah tersebut tidak seimbang dengan sumber daya mineral yang dikeruk dan degradasi kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan. Lihat: Nanik Trihastuti, Hukum Kontrak Karya: Pola Kerjasama Pertambangan Indonesia, (Malang: Setara Press), p. 92.

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambang Mineral, dan Batubara membentuk Tim Evaluasi dalam upaya menyeimbangkan posisi tawar dan keuntungan. Namun, upaya tersebut tetap menemui hasil buntu walaupun diperkuat oleh PP No. 23 Tahun 2010⁴ dan Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2012.⁵

Penolakan PTFI terhadap ketetapan Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan dan batu bara dianggap memberatkan pihak perusahaan. Seperti tercantum di dalam pasal 124 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009 dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 mengenai *self mining* dianggap sebagai kepentingan untuk menekan kerugian negara. Dan juga sebagai ketetapan untuk mewajibkan penggunaan perusahaan lokal, serta larangan penggunaan jasa tambang yang terafiliasi untuk melakukan proses operasional tambang dan pemurnian. Selain itu, anggapan atas ketetapan hilirisasi di dalam UU No. 9 Tahun 2009 sangat kontradiktif atas momentum rezim dan stabilitas pasar komoditas domestik dan global. Sektor pertambangan, terutama komoditi tembaga mengalami penurunan yang cukup drastis. Volume dan nilai ekspor tembaga dalam dua tahun terakhir (2011-2012) mengalami penurunan. Hal ini menjadi kekhawatiran beberapa pihak dikarenakan regulasi hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terlalu dipaksakan, terlambat dan tanpa koordinasi. Ledakan komoditas primer mengalami peningkatan yang diakibatkan

⁴ Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.

⁵ Pasal 5 ayat 1: Produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam tembaga berupa lumpur anoda dan tembaga telurid wajib dilakukan pengolahan dan/ atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian komoditas tambang mineral logam.

oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi (9-10%) atas implikasi liberalisasi ekonomi China dan India. Sedangkan, Indonesia dengan arogan melawan arus tersebut dengan melakukan proteksionis melalui kebijakan fiskal dan pajak yang mempersulit operasional pertambangan di hilir.

Telaah mengenai asumsi-asumsi tersebut, pada hakikatnya berada pada kohesi daya tawar di antara negara berdaulat dan PTFI itu sendiri. Konsep *bargaining* yang *state-centric* pada sub-bab sebelumnya menjelaskan bagaimana relasi di antara Pemerintah Indonesia dan PTFI merupakan transisi atas dialektika regulasi yang relatif. Proses UU Minerba yang diinterpretasikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bukti rezim kontrak yang usang dan posibilitas kepentingan negara yang telah berubah, memaksa keseimbangan daya tawar yang dianggap seimbang oleh PTFI untuk mencapai level equilibria melalui penguatan administratif, institusi dan regulasi negara ke dalam praktek neoliberalisme di wilayah pertambangan. Sehingga, situasi permainan melalui regulasi menjadi berubah dan melemahkan kekuatan institutif PTFI yang dimaknai sebagai kekuatan pasar pun melemah.

2.3.2. Teori Permainan (*Game Theory*): Keseimbangan Nash

Perkembangan teori permainan dalam pendekatan suatu analisis dimulai pada tahun 1838 oleh Antoine Cournot tentang duopoli (Colman, 2003: 136-198). Kemudian dikembangkan oleh Emile Borel pada tahun 1921, dan pada tahun 1944 sebagai pendekatan yang valid di dalam studi ekonomi hingga ilmu sosial oleh Von Neumann dan Oskar Morgenstern (Marschak, 1946: 971-15). Salah satu perkembangan teori permainan di dalam ilmu sosial yaitu "*Nash Equilibrium*"

atau dikenal dengan konsep keseimbangan Nash. Konsep keseimbangan Nash menjadi instrumen unik dan kompleks dalam mengukur sebuah kemungkinan yang bersifat *mutual deflection*. Yang menarik dari keseimbangan Nash adalah pola interaksi antara pemain yang menempatkan kondisi di mana tidak ada satupun pemain yang dapat memperoleh hasil yang lebih baik dari kemungkinan yang tersedia, sekaligus sebagai alat dalam mengkuantifikasi kemungkinan strategi dalam kebijakan. Kemungkinan yang tersedia dari teori permainan adalah kooperatif dan non-kooperatif. Pemain ditempatkan ke dalam bentuk-bentuk aliansi dalam memenangkan permainan (*cooperative game*) atau sebagai subjek yang rasional dalam memetakan pilihan-pilihan strategis untuk mencapai hasil akhir yang terbaik bagi pemain. Nash menggunakan angka yang sifatnya ordinal (seperti konsep permainan Neuman) untuk merepresentasikan bobot setiap tindakan para pemain atau aktor.

Formulasi teori permainan dan konsep keseimbangan Nash berfokus pada suatu konsep restrukturisasi dan analisis dalam memahami skenario-skenario strategis para pemain (atau aktor pengambil keputusan). Elemen-elemen di dalam metode teori permainan secara esensial terbagi menjadi; *players, actions, payoff structures*, dan *strategic form* (atau di dalam literatur ekonomi dikenal sebagai informasi) (Stengel, 2001). Di dalam situasi non-kooperatif, keseimbangan Nash berfungsi untuk mengkuantifikasikan situasi strategi-strategi yang dikalkulasikan ke dalam kemungkinan akhir permainan tersebut. Sehingga, tidak ada kemungkinan relatif bagi para pemain untuk lebih unggul dan mendominasi serta tidak ada keuntungan yang bersifat unilateral. Oleh karena itu, di dalam penelitian berikut ini penulis akan menggunakan perangkat teori permainan dalam

mengukur strategi-strategi melalui tinjauan *payoff structure*-nya. Skema dan kuota permainan yang akan diterapkan oleh penulis merujuk kepada konsep ‘*a mixed strategy*’ (Colman, 2003). Sebab tidak semua permainan mencapai keseimbangan Nash, maka dibutuhkan strategi dengan ruang yang luas untuk mencapai equilibrium.

$$s_i: \omega_i \rightarrow m(a_i), \text{ dimana } m \geq 1 \text{ dan } \int m(a_i) da_i = 1.$$

Merujuk pada persamaan ‘*game*’ tersebut, apabila *pure strategy* akan memberitahu pemain tindakan apa yang harus dipilih, maka strategi campuran merupakan seperangkat aturan yang memberitahu pemain untuk memilih tindakan yang berbeda. Dalam mengoperasionalkan konsep-konsep yang telah dijelaskan di bab dua berikut ini, penulis akan menitikberatkan kerangka konseptual pada studi kasus dominasi dan peran strategis Pemerintah Indonesia terhadap PT. Freeport Indonesia dalam meningkatkan daya tawar perdagangan tembaga di pasar global. Di dalam *payoff structure* pada *chicken game*, keseimbangan Nash dalam strategi ideal terdapat pada matriks (D,C) dan (C,D). Namun, pemetaan kemungkinan terjadinya kolaps akan semakin sempit, dapat dijewantahkan ke dalam empat *payoff* berikut:

- a. *The benefits of mutual cooperations* (C,C)
- b. *Relative to mutual deflection* (D,D)
- c. *The benefits of unilateral defection* (D,C)
- d. *Relative to unrequited cooperation* (C,D)

The payoff didasarkan pada pertimbangan untung rugi (*cost benefit*) yang rasional terhadap sikap aktor dalam memandang rasionalitas sebuah strategi

sehingga bermuara pada persamaan kepentingan. Dalam kasus Pemerintah Indonesia dan PTFI, sampai saat ini penyesuaian kebijakan di dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih dalam tahap renegosiasi hingga hari ini. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak melakukan penolakan dengan menanggalkan kepentingan bersama dalam regulasi yang sudah usang (Kontrak Karya). Begitu juga PTFI, sekaligus perusahaan induknya (Freeport McMorran Gold & Copper Inc.) melakukan defleksi terhadap negosiasi yang berjalan hampir tujuh tahun ini. Maka, sesuai dengan runtutan teori dan kerangka konseptual berikut, penulis akan menggunakan turunan teori permainan yang dinamakan *chicken game*.⁶

Tabel 2.1. Persamaan Ordinal Hasil Skenario *Chicken Game*

		PT FI	
		<i>Dare (D)</i>	<i>Chicken (C)</i>
Pemerintah Indonesia	<i>Dare (D)</i>	-4x, -4x	3x, 0
	<i>Chicken (C)</i>	0, 3x	x, x

Ke-empat domain tersebut dilandasi pada sifat strategi yang akan digunakan oleh kedua pemain. Penggunaan '*pure strategy*' dan '*mix strategy*'. Metode yang dipakai untuk mendapatkan keseimbangan Nash yaitu melalui *payoff-equating* sehingga terdapat probabilitas strategi yang memiliki penyamaan hasil. Metode tersebut apabila dilandasi dengan konsep *chicken game* akan memiliki

⁶ *Chicken Game* diibaratkan sebagai dua orang yang berhadapan untuk bertabrakan. Jika pemain I membelokkan stirnya, maka dia akan dikenal sebagai CHICKEN (CD) sementara yang lain menjadi DARE (DC). Jika tidak ada yang membanting stir, keduanya akan hancur (DD). Jika keduanya membanting stir, kehancuran reputasi masing-masing driver akan terbatas (CC).

kemungkinan equilibria pada domain (D,C); (C,D). Di dalam skenario permainan dalam penelitian ini, setiap pemain berada pada probabilitas struktur permainan yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Struktur Komponen Permainan

Pemain	Pemerintah Indonesia (PI) dan PTFI
Profil Tindakan	Kerja sama (<i>payoff equating</i>) = (C,C) atau konfrontasi (<i>mutual deflection</i>) = (D,D)
Indikator Aksi	<p>(1) Ketetapan Pemerintah Indonesia dalam mendorong implementasi UU No. 4 Tahun 2009 sebagai bentuk koherensi negara terhadap rezim pasar yang lebih dominan atas PTFI. Perangkat regulasi tersebut merupakan alat negara yang bersifat neomercantilis (non-liberal dan proteksionisme/relasi kebijakan substitutif) yang artinya, negara dan PTFI merepresentasikan komitmen terhadap rezim ekonomi global tertentu. Sehingga, kategori <i>payoff</i> berdasarkan asumsi tersebut bahwa negara (<i>dare</i>) dan PTFI (<i>chicken</i>) = <i>benefits of unilateral deflection</i> (D,C)</p> <p>(2) Perilaku PTFI didasarkan pada rezim pasar global yang bersifat neoliberal merepresentasikan skenario permainan pada kategori (C,D) = <i>relative to unrequited cooperations</i>. Negara melakukan (<i>chicken</i>) dan PTFI (<i>dare</i>)</p>
Indikator Pengkondisi	Penelitian ini menggunakan pengkondisi permainan berdasarkan model <i>chicken game</i> . Model pengkondisi yang dimaksud di dalam permainan ini disebut sebagai <i>payoff equating</i> melalui kemungkinan strategi (<i>mix strategy</i>) dari kedua pemain sehingga mencapai keseimbangan Nash. Dengan alasan bahwa kedua pemain adalah aktor rasional, maka kemungkinan kolaps pada kategori (D,D), maka pilihan tersebut akan dikesampingkan oleh kedua pemain.
Fungsi Hasil	(PI=Pemerintah Indonesia; dan PTFI= PT Freeport Indonesia) Dengan pengurutan ordinal pada kedua pemain adalah PI/PTFI (<i>dare, chicken</i>) = 4; PI/PTFI (<i>chicken, chicken</i>) = 1; PI/PTFI (<i>chicken, dare</i>) = 3; PI/PTFI (<i>dare, dare</i>) = - 4.

Maka, $PI/PTFI (D,C) > PI/PTFI (C,D) > PI/PTFI (C,C) > PI/PTFI (D,D)$

Melalui preferensi perilaku aktor pada Tabel 2.2. maka penelitian ini memiliki asumsi berdasarkan 3 skenario permainan berikut ini:

- 1) Jika Pemerintah Indonesia memilih strategi (I) kebijakan proteksionisme sedangkan PTFI memilih strategi (II) dimana mengubah KK menjadi IUPK, maka posisi tawar Pemerintah Indonesia berada pada kedudukan dominan yang disituasikan melalui implementasi kebijakan UU No. 4 Tahun (substitutif) 2009 di industri tembaga termasuk larangan ekspor. Dalam situasi tersebut, desakan institusi domestik Pemerintah Indonesia mendorong PTFI mengikuti muatan UU No 4 Tahun 2009 dan PTFI mengalami kerugian relatif akibat larangan ekspor konsentrat tembaga, pengalihan investasi, kemacetan produksi dan bea keluar produk tembaga.
- 2) Jika Pemerintah Indonesia memilih strategi (II), yakni penerapan kebijakan yang bersifat komplementer sedangkan PTFI memilih strategi (I) dimana merubah sifat UU No 4 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan muatan KK dan situasi pasar yang lebih komplementer, maka, posisi tawar PTFI lebih dominan dari Pemerintah Indonesia yang disituasikan dengan kebijakan perdagangan bersifat liberal dimana ekspor dijalankan dan bea keluar diringkankan dengan penyesuaian neraca perdagangan tembaga global. Negara disituasikan dalam kondisi yang lemah akibat konfrontasi dari PTFI dan memilih untuk berada pada kondisi keseimbangan statis pasar. Maka, negara dirugikan dengan nilai relatif kerugian adalah (1).
- 3) Jika Pemerintah Indonesia dan PTFI bersama-sama menerapkan strategi (I) dimana kedua pemain mengkonfrontasikan strategi dominannya, maka akan terjadi kolaps dan kerugian akan diderita oleh kedua pemain.

2.4. Hipotesis Penelitian

Keterkaitan antar variabel membentuk relasi konsep yang disebut sebagai preposisi (Neuman, 2013:68). Dalam penelitian ini, cara terbaik untuk mengoperasionalkan teori permainan yaitu dengan meninjau konsep *rational choice* dan *payoff* dari aktor dominan dengan mempertimbangkan strategi idealnya terutama dalam mencapai kerjasama atau menolak bekerja sama. Menurut Robert Axelrod and Robert O. Keohane baik di dalam suatu interaksi kerjasama maupun defleksi, kondisi aktor yang bertikai sekalipun memiliki konformitas dengan titik tengah untuk mencapai kebijakan yang kompatibel (Axelford & Keohanne, 1985: 226-254). Penulis melalui kacamata dan asumsi neomercantilisme akan lebih menitikberatkan analisis pada interpretasi konsep *state-centric* dalam meningkatkan *bargaining power* Pemerintah Indonesia perdagangan tembaga serta relasinya dengan pasar global. Selain itu, penulis menggunakan model *state-centric bargaining* untuk mencapai perangkat strategis di dalam penggunaan konsep teori permainan pada kerangka *bargaining power* Pemerintah Indonesia terhadap PTFI.

Hipotesis menurut Neuman adalah serangkaian pernyataan tentatif tentang suatu hubungan variabel di dalam penelitian yang dapat diuji secara empirik (Neuman, 2013:68). Evaluasi terhadap hubungan variabel tersebut akan diuji secara berulang dengan menguji preposisi teoretis yang dapat mendukung hipotesis. Maka, rumusan hipotesis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Jika peran strategis Pemerintah Indonesia melalui penerapan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di dalam industri pertambangan semakin dominan, maka PT Freeport Indonesia

akan mengalami kerugian yang relatif di dalam perdagangan tembaga di pasar global.

2.5. Verifikasi Variabel dan Indikator

Berdasarkan pengintegralan konsep permainan yang telah dijelaskan pada Tabel 2.2., telaah yang disesuaikan dengan studi kasus penelitian berikut ini akan dikelompokkan ke dalam skema verifikasi indikator-indikator dan variabel-variabel empirik dan teoritis (Neuman, 2014:71). Hubungan asosiatif di antara pengkondisi penelitian dan tolok ukurnya terhadap pembuktian hipotesis akan diuraikan dalam Tabel 2.3. berikut ini.

Tabel 2.3. Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Peran strategis Pemerintah Indonesia dalam industri pertambangan semakin dominan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determinasi kebijakan perdagangan dan industri pertambangan yang proteksionis. 2. Terjadinya artikulasi kepentingan Indonesia yang ditandai dengan renegotiasi posisi tawar yang tidak seimbang di antara negara dengan PTFI. 3. Perubahan paradigmatis negara dalam strategi industri pertambangan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data (fakta dan rangka) mengenai determinasi kebijakan perdagangan dan pertambangan yang proteksionis. 2. Data (fakta dan rangka) mengenai adanya artikulasi kepentingan yang ditandai dengan renegotiasi posisi tawar yang tidak seimbang di antara negara dan PTFI.

	<p>cenderung neomercantilis.</p> <p>4. Skenario strategi kebijakan substitutif (<i>state-centric</i>) terhadap PTFI.</p>	<p>3. Data (fakta dan rangka) mengenai perubahan paradigmatik negara yang cenderung neomercantilis.</p> <p>4. Data (fakta dan rangka) mengenai skenario kebijakan substitutif (<i>state-centric</i>) terhadap PTFI.</p>
<p>Variabel Terikat:</p> <p>PT. Freeport Indonesia dan Perdagangan Tembaga di Pasar Global</p>	<p>1. Potensi pertambangan dan profil perdagangan tembaga Indonesia.</p> <p>2. Alur operasional industri oleh PTFI dan koherensinya dengan industri hulu-hilir tembaga di pasar global.</p> <p>3. Artikulasi posisi tawar PTFI melalui Kontrak Karya terhadap Pemerintah Indonesia.</p> <p>4. Skenario strategi kebijakan komplementer (<i>market-friendly</i>) terhadap Pemerintah</p>	<p>1. Data (fakta dan rangka) mengenai potensi pertambangan dan profil perdagangan tembaga Indonesia.</p> <p>2. Data (fakta dan rangka) alur operasional industri oleh PTFI dan koherensinya dengan industri hulu-hilir tembaga di pasar global.</p> <p>3. Data (fakta dan rangka) artikulasi posisi tawar PTFI melalui Kontrak Karya terhadap</p>

	Indonesia.	Pemerintah Indonesia. 4. Data (fakta dan rangka) skenario strategi kebijakan komplementer (<i>market-friendly</i>) terhadap Pemerintah Indonesia.
--	------------	--

